

Peran Pemerintah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Beasiswa Aparatur Desa

Zaki Al Mubarak

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Indonesia

e-mail: zaki88mubarak@gmail.com

Moh. As'adi

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Indonesia

e-mail: asadi.bwi@gmail.com

Gustin Ayu Perwitasari

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ayuperwitasari1@gmail.com

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 01, Dusun Krajan, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

Korespondensi penulis : zaki88mubarak@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine how the role of the village government in improving human resources (HR) and supporting and inhibiting factors of the role of the village government in improving human resources (HR) in Olehsari Village, Glagah District, Banyuwangi Regency. The research method used in this study is qualitative research. Data collection techniques used in this study are observation, interview and documentation techniques. The instrument in this study is the researcher himself. While the data analysis applied in this study is interactive analysis, namely, data collection, data reduction, and conclusions. The results of this study show that the Government of Olehsari Village, Glagah District, Banyuwangi Regency has shown an important and proactive role in efforts to improve human resources (HR) through scholarship programs. Inhibiting factors in the implementation of this scholarship program include budget constraints, lack of information and counseling, bureaucracy and administrative constraints and lack of community involvement. Nevertheless, strong commitment and cooperation are expected to continue to encourage sustainable development and community welfare in the Olehsari Village Government, Glagah District, Banyuwangi Regency.*

Keywords: *Role of Village Government, Human Resources (HR)*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan faktor pendukung serta penghambat peran pemerintah desa dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yaitu, pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan peran yang penting dan proaktif dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program beasiswa ini diantaranya, keterbatasan anggaran, kurangnya informasi dan penyuluhan, birokrasi dan kendala administratif serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, komitmen dan kerjasama yang kuat diharapkan dapat terus mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: Peran Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia (SDM)

LATAR BELAKANG

Secara filosofis desa merupakan suatu kesatuan hukum yang di akui oleh negara dan berhak mengatur urusannya untuk kepentingan masyarakat setempat sebagai suatu sistem Pemerintahan Indonesia (Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa menegaskan kembali komitmennya terhadap pemerintahan yang baik dan pembangunan desa yang kuat, unggul, bebas dan demokratis, serta meletakkan dasar yang kokoh bagi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Al-Mubarak & Putri (2022) pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*).

Desa merupakan modal pembangunan di berbagai bidang termasuk sosial politik, budaya dan ekonomi, termasuk pondasi dasar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebelum melangkah ke urusan pemerintah pusat yang di kelola oleh pemerintah lokal setempat agar lebih meningkat keberadaannya. Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selajutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung (Al Mubarak, 2023). Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga desa harus menjadi ujung tombak pengelolaan masyarakat, karena pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat (Aldiana, Santoso & Adji, 2020). Salah satunya adalah pelayanan, pelayanan Desa Olehsari yang meningkat menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam sistem dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sejalan dengan ungkapan Bapak Andriyan selaku masyarakat di Desa Olehsari yaitu: “Pelayanan perangkat Desa Olehsari kalau sekarang sangat baik mbak, jika dibandingkan dengan yang dulu-dulu, kalau dulu mau ngurus apa-apa responnya lambat, berbeda dengan sekarang mau ngurus apa-

apa cepet, misalnya kalau mau ngurus surat keterangan domisili, SKTM, dll.” (Wawancara, 5 Juli 2023).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelumnya tingkat pelayanan di Desa Olehsari tidaklah maksimal, hal tersebut dikarenakan lambatnya respon dan tanggapan aparat desa dalam melayani masyarakat. Dampak dari lambatnya respon dan tanggapan ini adalah ketidakpuasan dan ketidaknyamanan dari masyarakat. Selain itu, keterlambatan dalam mendapatkan informasi atau bantuan yang dibutuhkan juga dapat menyebabkan penundaan atau kesulitan dalam menyelesaikan berbagai urusan administrasi atau keperluan penting lainnya.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan SDM yaitu dengan menggadeng lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan ikatan kerjasama yaitu Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Program yang pada saat ini berjalan yaitu program bantuan pendidikan bagi aparat desa yang masih belum sarjana, selanjutnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan kejenjang sarjana melalui program tersebut. Program tersebut diharapkan agar aparat desa dapat menjadi contoh akan pentingnya pendidikan didalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sampai dengan saat ini jumlah peserta beasiswa tersebut sebanyak 8 orang peserta. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hermanto selaku staf umum di Pemerintah Desa Olehsari sekaligus penerima beasiswa peningkatan SDM yaitu: “Pak Ribut Santuso dulu jabatannya staf biasa, namun setelah beliau lulus langsung jabatannya naik menjadi sekretaris desa, dengan adanya beasiswa ini saya pribadi merasa terbantu dan senang bisa belajar kembali, selain itu saya juga berharap nantinya setelah lulus sama seperti pak Ribut Santuso langsung naik jabatan lebih tinggi”. (Wawancara, 4 Juli 2023).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana (S1). Seseorang akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi atau lebih baik dalam pekerjaan atau kariernya. Pendidikan tingkat sarjana membekali seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam dalam bidang tertentu, sehingga dapat menjadi lebih kompeten dan berkualifikasi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Kenaikan jabatan bisa menjadi pendorong motivasi dan kesempatan untuk mencapai prestasi lebih tinggi serta berkontribusi lebih baik dalam pekerjaan atau organisasi di mana mereka bekerja seperti yang terjadi di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amantha (2021) menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menjalankan peran sebagai stabilisator, inovator, pelopor dan modernisator dalam pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Wasdi (2022) menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai motivator, fasilitator, dinamisator, stabilisator, inovator dan pelopor telah berjalan namun masih memerlukan perbaikan yang konsisten. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa peran pemerintah desa masih memerlukan pembenahan yang substansial. Dalam konteks perkembangan zaman dan teknologi yang terus berlanjut, perlu adanya inovasi baru yang relevan untuk diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pembenahan dan inovasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus dalam mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang sesuai dengan tantangan dan peluang yang muncul di lingkungan desa.

Mengacu pada uraian di atas maka penulis memiliki ketertarikan melakukan kajian lebih mendalam dalam bentuk penelitian dengan mengangkat judul “Peran Pemerintah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Beasiswa Aparatur Desa”.

KAJIAN TEORITIS

Peran

Peran di ibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lain akan tetapi kelekatan sangat terasa sekali. Seseorang memiliki peran atau peranan karena dia (orang tersebut) mempunyai status di dalam masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan yang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya. Menurut Soekanto (2004) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Pendapat lain diungkapkan oleh Riyadi (2002) bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah bagian penting dari interaksi sosial yang mengatur cara individu dan organisasi berperilaku dalam masyarakat. Peran ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dan berkontribusi dalam lingkungannya berdasarkan status dan harapan yang ada.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat (Mansyur, 2018). Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa (Widjaja, 2009). Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa. Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan (Mansyur, 2018). Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara langsung terhubung dengan masyarakat. Selain mengurus urusan formal, pemerintah desa juga menangani urusan informal, seperti adat, agama, dan hak-hak asal-usul masyarakat. Pemerintahan desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari

kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi (Krisyohan, 2014). Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu dalam asosiasi yang menyumbangkan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan hierarkis. Sejauh SDM, yang dicakup tidak terbatas pada spesialis, staf pengajar atau dosen berpengalaman, tetapi semua tenaga kerja dimanfaatkan oleh asosiasi untuk memahami tujuannya (Karyaningtyas, 2018).

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diartikan sebagai individu-individu yang ada dalam suatu organisasi dan berperan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengertian SDM mencakup semua tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai kegiatan perusahaan, tidak hanya terbatas pada spesialis, staf pengajar, atau tenaga yang berpengalaman. SDM mencerminkan aspirasi manusia dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, baik dalam hal pemikiran maupun pelaksanaan tugas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, serta menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Emzir (2010) metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan atau pengalaman orang di lingkungan peneliti. Menurut Riduwan (2010) teknik pengumpulan data ialah metode pengumpulan data atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh dengan tahapan, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), *conclusion drawing/verification*. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Olehsari dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program beasiswa bagi aparatur desa. Peran ini mencakup tiga aspek utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan motivator, yang secara sinergis bekerja untuk mengoptimalkan pembangunan SDM di tingkat desa.

1. Sebagai fasilitator, pemerintah desa berfungsi sebagai penyedia dukungan dan kemudahan bagi aparatur desa untuk mengakses program beasiswa. Pemerintah desa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan bagi aparatur desa agar dapat mengikuti program beasiswa dengan lancar. Mereka menyediakan informasi lengkap tentang persyaratan, proses aplikasi, dan manfaat dari program beasiswa tersebut, sehingga aparatur desa dapat dengan mudah memanfaatkan kesempatan ini. Sebagai fasilitator, peran pemerintah desa dalam program beasiswa menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan dan manfaat maksimal bagi aparatur desa. Komitmen untuk menyediakan dukungan dan kemudahan mencerminkan sikap inklusif dan perhatian terhadap pembangunan SDM yang lebih baik di tingkat desa.
2. Sebagai regulator, pemerintah desa bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan aturan terkait pelaksanaan program beasiswa. Mereka menetapkan kriteria seleksi yang adil dan objektif untuk memastikan bahwa beasiswa diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan berkomitmen untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Pemerintah desa juga mengawasi proses pelaksanaan program beasiswa agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai regulator, peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program beasiswa menjadi penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan efektivitas program tersebut. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan aturan yang transparan dan akuntabel, sehingga proses seleksi dan pelaksanaan program berjalan dengan baik.
3. Sebagai motivator, pemerintah desa berperan untuk memberikan dorongan, dukungan, dan semangat kepada aparatur desa dalam mengambil kesempatan untuk mengikuti program beasiswa. Mereka menyadari bahwa pengembangan SDM aparatur desa adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa secara aktif mendorong dan menginspirasi aparatur desa untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui pendidikan, sehingga mereka dapat berperan lebih efektif dan profesional dalam

mendukung pembangunan desa. Sebagai motivator, peran pemerintah desa menjadi kunci dalam memotivasi aparatur desa untuk mengambil kesempatan dalam mengikuti program beasiswa dan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. Pemerintah desa menyadari bahwa investasi dalam pengembangan SDM aparatur desa adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Melalui peran tersebut, Pemerintah Desa Olehsari berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi pengembangan SDM aparatur desa melalui program beasiswa. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi antara pemerintah desa dan aparatur desa, program beasiswa ini telah memberikan dampak positif bagi perkembangan individu aparatur desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah desa juga menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan peran pemerintah dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Keberhasilan alumni program beasiswa pemerintah Desa Olehsari dalam naik jabatan adalah bukti nyata dari efektivitas dan manfaat dari program beasiswa yang telah dilaksanakan. Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa melalui program beasiswa, dan hasilnya dapat dilihat dari kemajuan dan kesuksesan para alumni. Kenaikan jabatan bagi alumni program beasiswa adalah hasil dari usaha dan dedikasi mereka dalam mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan yang mereka dapatkan melalui program beasiswa. Dukungan dan motivasi yang diberikan oleh pemerintah desa menjadi pendorong bagi para alumni untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mereka menjadi lebih siap dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Desa Olehsari dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi telah memainkan peran krusial dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyelenggarakan program beasiswa bagi aparatur desa. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa faktor pendukung. Faktor pendukung adalah faktor-faktor atau elemen-elemen yang berkontribusi positif dan mendukung keberhasilan program beasiswa dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa. Berdasarkan pada uraian hasil penelitian di atas maka ditemukan beberapa faktor pendukung peran pemerintah desa olehsari dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) diantaranya sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah desa, komitmen yang kuat dari pemerintah desa terhadap program beasiswa merupakan pondasi yang kokoh dalam mencapai kesuksesan program ini. Ketika pemerintah desa memiliki kesadaran dan tekad yang tinggi untuk meningkatkan SDM melalui beasiswa, hal ini akan tercermin dalam upaya dan dedikasi mereka dalam melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh dan efektif. Komitmen yang kuat dari pemerintah desa berarti bahwa program beasiswa dianggap sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Pemerintah desa akan menyisihkan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk mendukung program beasiswa ini, bahkan jika anggaran terbatas. Kesadaran akan pentingnya pengembangan SDM menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk berinvestasi dalam program beasiswa sebagai sarana untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.
- b. Dukungan anggaran, alokasi anggaran yang memadai untuk program beasiswa akan memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program dengan baik. Dukungan anggaran juga dapat memberikan kesempatan lebih banyak bagi aparatur desa untuk mengikuti beasiswa. Alokasi anggaran yang memadai adalah salah satu faktor krusial dalam menjalankan program beasiswa dengan sukses. Pemerintah desa yang menyediakan anggaran yang cukup untuk program ini akan memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program dengan baik dan berkelanjutan. Dengan anggaran yang memadai, program beasiswa dapat mencakup lebih banyak aparatur desa, sehingga kesempatan untuk mengikuti beasiswa dapat diberikan kepada lebih banyak individu yang memenuhi kriteria seleksi. Hal ini akan meningkatkan partisipasi dan penerimaan program secara keseluruhan.
- c. Transparansi dan akuntabilitas, transparansi dalam proses seleksi penerima beasiswa dan akuntabilitas dalam penggunaan dana beasiswa merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Jika proses seleksi dan penggunaan dana dilakukan dengan jujur dan adil, maka program ini akan lebih berhasil. Transparansi dalam proses seleksi penerima beasiswa dan akuntabilitas dalam penggunaan dana beasiswa adalah elemen kritis yang akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Ketika pemerintah desa melakukan proses seleksi secara terbuka dan jujur, serta menggunakan dana beasiswa dengan transparan dan akuntabel, maka program ini akan lebih diterima dan dihargai oleh masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas dalam penggunaan dana beasiswa adalah hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap program ini. Pemerintah desa harus melakukan pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana beasiswa dan menyusun laporan keuangan yang transparan secara rutin. Laporan keuangan yang jelas dan terbuka akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana dana beasiswa digunakan dan apakah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa juga harus memastikan bahwa dana beasiswa digunakan untuk hal-hal yang relevan dan bermanfaat bagi para penerima beasiswa. Penggunaan dana yang tepat akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan SDM aparatur desa.

Dengan adanya faktor pendukung ini, program beasiswa Pemerintah Desa Olehsari mampu memberikan dampak positif dan signifikan dalam pengembangan SDM aparatur desa dan masyarakat. Faktor-faktor ini menjadi fondasi yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih maju dan berkelanjutan. Namun, sebagai program yang kompleks, beberapa faktor penghambat juga ikut mempengaruhi keberhasilan implementasi program beasiswa:

- 1) Keterbatasan anggaran, jika anggaran yang dialokasikan untuk program beasiswa terbatas, maka kesempatan bagi aparatur desa untuk mengikuti beasiswa dapat menjadi terbatas pula. Hal ini dapat mengurangi dampak positif dari program. Ketika anggaran yang dialokasikan untuk program beasiswa terbatas, hal ini dapat menjadi kendala dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi aparatur desa untuk mengikuti beasiswa. Keterbatasan anggaran dapat mengakibatkan jumlah beasiswa yang tersedia menjadi terbatas, sehingga tidak semua aparatur desa yang memenuhi kriteria dapat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini. Dampak dari keterbatasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada efektivitas program beasiswa dan upaya meningkatkan SDM aparatur desa.
- 2) Kurangnya informasi dan penyuluhan, jika masyarakat kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang program beasiswa atau cara mengaksesnya, maka partisipasi masyarakat dalam program ini bisa menjadi rendah. Kurangnya informasi yang memadai tentang program beasiswa atau cara mengaksesnya dapat menjadi hambatan utama dalam partisipasi masyarakat dalam program ini. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan, mereka mungkin tidak menyadari atau memahami kesempatan yang ada untuk mengikuti program beasiswa. Dampaknya adalah partisipasi masyarakat dalam program ini bisa menjadi rendah, sehingga potensi dan bakat individu

yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui beasiswa dapat terabaikan.

- 3) Birokrasi dan kendala administratif, kendala administratif dapat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program beasiswa dengan lancar dan efisien. Masalah administratif yang tidak teratasi dengan baik dapat menyebabkan penundaan, kebingungan, dan bahkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan program beasiswa. Salah satu kendala administratif yang sering dihadapi adalah proses pendaftaran dan pengumpulan dokumen. Jika proses ini tidak diatur dengan baik, calon penerima beasiswa mungkin kesulitan dalam mengakses informasi tentang persyaratan dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mendaftar. Ketidakjelasan proses pendaftaran dan persyaratan yang rumit dapat menyulitkan calon penerima beasiswa untuk memenuhinya dengan tepat waktu.

Dalam menghadapi faktor penghambat ini, pemerintah desa perlu berupaya untuk mengidentifikasi solusi dan strategi yang tepat. Upaya meningkatkan alokasi anggaran, meningkatkan sosialisasi dan akses informasi, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi program dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pemerintah desa juga dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan program beasiswa, sehingga program ini dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan SDM dan pembangunan desa secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Olehsari berhasil menciptakan lingkungan kondusif bagi pengembangan SDM aparatur desa melalui program beasiswa. Dengan komitmen kuat dan kolaborasi eksternal, program ini memberikan dampak positif pada individu aparatur desa dan pembangunan desa. Kendala yang ditemukan diantaranya keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program, pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen, pengelolaan anggaran yang bijaksana, dan partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua saran yang dapat diberikan, yakni untuk Posyandu Anggrek dan bagi peneliti yang akan melanjutkan studi ini.

Rincian dari saran-saran ini adalah sebagai berikut:

- a) Posyandu Anggrek: Posyandu Anggrek sebaiknya terus memotivasi dan mendukung komitmen kader mereka, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Perlu juga berupaya untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran Posyandu Anggrek.
- b) Saran untuk Peneliti Selanjutnya: Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalam dalam mengidentifikasi dan mengatasi faktor penghambat yang dihadapi oleh Posyandu Anggrek, serta mengevaluasi dampak dari upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh kader Posyandu Anggrek. Studi perbandingan dengan posyandu lainnya juga dapat menjadi pendekatan yang relevan.

DAFTAR REFERENSI

- Al Mubarak, Z. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Sampah Organik Menjadi Produk Eco Enzyme Pada Kelompok PKK Desa Gitik. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(3), 199-206. <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i3.596>
- Al Mubarak, Z., & Putri, E. I. E. (2022). Peran Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. *AT TAMKIN: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 54-62. <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/attamkin/article/view/1164>
- Aldiana, U., Adji, S., & Santoso, E. (2020). Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Wom (Word of Mouth) Terhadap Kepuasan Konsumen. *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.24269/asset.v2i2.2390>
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67-79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Karyaningtyas, S. (2018). Kinerja Sekertaris Desa Pasca Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 15(1). <https://doi.org/10.37849/midi.v15i1.49>
- Krisyohan, K. (2014). *Analisa Hukum Terhadap Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Mansyur, A. (2018). *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintah Desa Prespektif Regulatif Dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero.

- Riduwan. (2010). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wasdi, W. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Di Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojunggambir Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(02), 223-237. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.524>
- Widjaja, A.W. (2009). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.